



Mendagri Minta Optimalisasi BTT dan Bansos

# Serapan Anggaran Pemprov Kalbar Capai 63,83 Persen

*Berdasarkan data Ditjen Bina Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dari pemutakhiran laporan 22 pemerintah provinsi per 4 November 2022, tingkat penyerapan anggaran atau realisasi belanja Pemprov Kalimantan Barat sudah sebesar 63,83 persen. Sementara pendapatan daerah Provinsi Kalbar sudah mencapai 93,98 persen.*

Tidak Terduga (BTT) dan bantuan sosial (bansos) di sisa tahun anggaran 2022 ini. Ia menekankan Pemda untuk menggunakan jangka waktu penggunaan anggaran yang hanya tersisa satu bulan lagi. "Karena anggaran tersebut akan menjadi SiLPA jika tidak digunakan," pesannya.

DATA tersebut diketahui jajaran Forkopimda tingkat saat Rapat Koordinasi pengendalian inflasi daerah yang diikuti Gubernur Kalbar Sutarmidji secara virtual dari Ruang Analisis Data, Kantor Gubernur, Senin (7/11). Dimana rapat yang diikuti seluruh kepala daerah, serta

Selain itu Mendagri juga meminta Pemda dengan tingkat inflasi terendah untuk memaparkan kiat yang dilakukan dalam menekan inflasi di daerahnya.

◆ Ke Halaman 15 kolom 1



BIRO ADPIM KALBAR FOR PONTIANAK POST  
**RAKOR** : Gubernur Kalbar Sutarmidji didampingi Asisten Perencanaan dan Pembangunan Ignasius IK, dan Kepala Biro Perencanaan mengikuti Rakor pengendalian inflasi daerah secara virtual dari Ruang Analisis Data, Kantor Gubernur, Senin (7/11).

## Serapan Anggaran Pemprov Kalbar Capai 63,83 Persen

Sambungan dari halaman 9

Sementara untuk Pemda dengan tingkat inflasi tertinggi, diminta menyampaikan kendala-kendala yang dihadapi dalam menekan inflasi. "Saya minta seluruh kepala daerah untuk bisa menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang rata-rata penggunaannya

masih 15 persen. Selain itu, penggunaan dana juga baru mencapai 50 persen," terangnya.

Usai mengikuti rakor pengendalian inflasi daerah, Asisten Perencanaan dan Pembangunan Kalbar, Ignasius IK menjelaskan, Pemprov sudah sangat responsif dalam mengendalikan inflasi daerah,

baik itu melalui kebijakan makro maupun mikro. Hal itu menurutnya bisa dilihat dari tingkat inflasi Kalbar yang terkendali karena beberapa upaya terus-menerus dilakukan.

Di antaranya ada operasi pasar, penyerahan bansos paket bahan pangan, monitoring harga, dan sidak ke pasar-pasar

tradisional. "Kemudian, Pemprov sudah membangun kerja sama antar daerah dan sudah inisiasi daerah-daerah untuk saling kerja sama, terutama di lingkup Kalbar. Daerah yang surplus diharapkan bisa mendistribusikan ke daerah-daerah yang minus, dalam rangka menjaga kestabilan harga," jelasnya. **(bar/r)**